



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

## Pemprov DKI Bersikukuh Melanjutkan

**JAKARTA** - Pemprov DKI Jakarta tetap melanjutkan pemotongan kabel optik di sejumlah wilayah meski upaya tersebut diprotes sejumlah kalangan. Apalagi, keberadaan kabel udara tersebut sudah tidak diperbolehkan jika mengacu Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penempatan Jaringan Utilitas.

"Aturan itu menjelaskan kabel tidak boleh lagi berada di atas udara, kecuali berada di titik *flyover* (jalanlayang)," ungkap Harikemarin.

Pernyataan tersebut menjawab permintaan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang meminta Pemprov DKI Jakarta untuk hentikan pemotongan kabel optik karena dinilai melanggar hak konsumen telekomunikasi.

Menurut Hari, dalam waktu dekat, pihaknya akan kembali memotong jaringan FO yang membentang di pinggir Jalan Kemang Raya dan Jalan Kramat Raya. Pemotongan kabel itu merupakan bagian dari Kegiatan Strategis Daerah (KSD) pembuatan trotoar demi pejalan kaki dengan anggaran Rp300 miliar untuk 175 paket KSD di DKI.

"Sebetulnya kami sudah memberikan kesempatan Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) untuk menurunkan kabel tersebut mulai Januari, Februari, Maret, April sampai Juli tapi belum turunkan. Makanya saya bilang mulai Agustus lalu tidak ada lagi alasan," jelasnya.

Hari mengatakan, pihaknya telah menyiapkan *manhole* sebagai tempat sementara peletakan kabel. Posisi lubang saluran itu berada di pinggir jalan atau di atas trotoar setiap berjarak 25 meter. "Sudah kami siapkan, harusnya mereka



ANTARA/RIWAN AWAL LINGGA

Petugas memotong kabel fiber optik yang semrawut di kawasan Palmerah, Jakarta, beberapa waktu lalu. Tindakan itu untuk memberikan keamanan dan kenyamanan para pengguna jalan yang melintasi kawasan tersebut.

bisa menaruh kabel itu di *manhole* yang kami buat," ungkapnya.

Ketua Harian YLKI Tulus Abadi meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memerintahkan jajarannya untuk menghentikan sementara pemotongan kabel optik yang dilakukan oleh Dinas Bina Marga. Menurut dia, langkah tersebut melanggar hak-hak konsumen telekomunikasi.

Selain melanggar dan merugikan hak konsumen, pemotongan kabel telekomunikasi milik anggota Apjatel melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 336 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Seharusnya, kata dia, Pemprov DKI Jakarta melakukan koordinasi dengan Apjatel sebelum melakukan penertiban.

"Kami minta Pemprov DKI menghentikan langkah tersebut dan segera berkoordinasi dengan operator telekomu-

nikasi yang tergabung dalam Apjatel," kata Tulus Abadi dalam siaran tertulisnya kemarin.

YLKI melihat banyak kebijakan Pemprov DKI yang aneh dan melanggar regulasi serta berpotensi mengganggu kepentingan konsumen, misalnya rencana mengizinkan pedagang kaki lima (PKL) berjualan di trotoar. "Trotoar itu untuk pejalan kaki bukan untuk PKL dan itu jelas melanggar UU Lalu Lintas," ungkapnya.

Pengamat telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung Ian Joseph Matheus Edward menilai penataan dan perbaikan trotoar yang dilakukan Pemprov DKI sebenarnya sudah baik. Namun, dia menyayangkan proses eksekusinya.

Menurutnya, sebelum Dinas Bina Marga melakukan penertiban kabel optik, seharusnya disiapkan terlebih dahulu

*ducting* atau saluran yang nantinya akan digunakan untuk menaruh kabel optik atau kabel utilitas lainnya.

*Ducting* yang dibuat oleh Pemprov DKI juga bukan sekadar lubang satu yang ada di ujung-ujung jalan dan bukan di tengah jalan. *Ducting* tersebut harus memiliki standar internasional seperti layaknya *smart city* yang ada di dunia.

"Standarnya harus ada. Misalnya *ducting* atau saluran tersebut harus bisa menampung beberapa kabel baik FO dan sarana utilitas lainnya seperti hidran, saluran PAM, kabel listrik. *Ducting* tersebut juga harus ada di dua sisi jalan dan mudah untuk dibuka dan terdapat jalur akses ke arah persil, sehingga ketika ada gangguan atau ada operator ingin menambah kapasitas FO-nya maka mereka tak harus menggali lagi," ungkapnya.

● **bima setiyadi**